

Potensi Penerapan Ekonomi Biru Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta

The Potential Application of Blue Economy in Supporting Sustainable Tourism in The Coastal Areas of Yogyakarta Province

*Maria Nooza Airawati¹, Ibnu Fauzi¹ dan Alan Putranto²

¹Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika - Badan Riset Inovasi Nasional
Jalan Hidrodinamika, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Department of Civil Engineering, National Central University
No.300, Chung-da Rd. Chung-Li city, Tao-Yuan 32011, Taiwan, Republic of China

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 23 Mei 2023
Perbaikan naskah: 27 Oktober 2023
Disetujui terbit : 20 Desember 2023

Korespondensi penulis:
Email: mari016@brin.go.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i2.12723>



ABSTRAK

Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, hal tersebut juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan pariwisata merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain perkembangan kegiatan pariwisata bahari di wilayah pesisir DIY masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di wilayah pesisir adalah ekonomi biru atau *Blue Economy* (BE), yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pariwisata yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerapan BE dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir DIY. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 5 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Pengumpulan data menggunakan *literature review* dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Pariwisata DIY. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator penerapan BE yang merupakan kombinasi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) dan *Ocean Health Index* (OHI). Strategi pengembangan dianalisis menggunakan matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Hasil analisis menunjukkan potensi penerapan ekonomi biru dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di DIY sangat besar, namun masih dibutuhkan beberapa strategi pengembangan.

Kata Kunci: ekonomi biru; kemiskinan; pariwisata berkelanjutan; wilayah pesisir; Yogyakarta

ABSTRACT

The condition of coastal areas that are rich in potential is not directly proportional to the level of welfare of the people in coastal areas, and this also happens in the Yogyakarta Province (DIY). Tourism activities are one of the solutions to improve people's welfare. However, on the other hand, developing marine tourism activities in the DIY coastal area still faces various environmental problems. One concept that can be applied to address problems in coastal areas is the blue economy or *Blue Economy* (BE), namely the sustainable use of marine resources to improve people's welfare by optimizing sustainable tourism. This study analyzed the potential for applying BE and strategies for developing sustainable tourism in the DIY coastal area. This research was carried out over five months, from January to May 2023. Data collection used literature reviews and interviews with the Maritime Affairs and Fisheries Service, Bappeda and the DIY Tourism Office. The data is then analyzed using BE implementation indicators. The development strategy is analyzed using the *Strengths, Weaknesses, Opportunities* and *Threats* (SWOT) matrix. The analysis results show that the potential for implementing the blue economy in supporting sustainable tourism in DIY is excellent, but several development strategies are still needed.

Keywords: blue economy; poverty; sustainable development; coastal areas; Yogyakarta

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 99.093 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Sebagian besar wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan laut dimana berbagai macam potensi baik sumber daya alam dan jasa lingkungan terdapat di wilayah pesisir. Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ini ternyata

tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Pada tahun 2021 kemiskinan ekstrim terjadi di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan mayoritas 69% kabupaten berada di wilayah pesisir. Di tahun 2022 pemerintah memperluas jangkauan penanggulangan kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota di 25 provinsi dengan 69% kabupaten berada di wilayah pesisir (Kementerian Komunikasi dan Informasi,

2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki persoalan yang lebih kompleks (Gai *et al.*, 2018; Kominfo, 2021; Rukin, 2018). Secara umum, kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2012).

Kondisi masyarakat wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih tergolong miskin dan belum sepenuhnya sejahtera. DIY merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, dengan total panjang garis pantai 126 kilometer (Sidik, 2015). Gabungan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 di 3 Kabupaten Provinsi DIY yang terletak di wilayah pesisir yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar 40,81%. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan gabungan total PDRB Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terletak di wilayah non pesisir (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022). Berdasarkan tingkat kemiskinan, wilayah pesisir yang berbatasan dengan laut memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah non pesisir (Bappeda DIY, 2018; Indraswari, 2023; Lázár *et al.*, 2020; Pasda *et al.*, 2019). Rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya keterampilan serta kesempatan kerja menjadi faktor kendala terbesar untuk bisa lepas dari kemiskinan (Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020). Kemiskinan menjadi suatu masalah yang sangat kompleks sehingga untuk menanggulanginya memerlukan solusi dan strategi yang tepat dan berkesinambungan (Ikejiaku, 2009). *Blue Economy* (BE) memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Konsep BE bertujuan untuk meningkatkan penghidupan dan mata pencaharian masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga kelestarian

sumber daya laut dan lingkungan pesisir (Chandra, 2021; Maeyangsari, 2023; Martínez-Vázquez *et al.*, 2023; Nasution, 2022).

Kegiatan pariwisata juga merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adinugroho, 2017; Rif'an & Irawati, 2020; Setijawan, 2018). Salah satu potensi pariwisata DIY berasal dari sektor bahari. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang memanfaatkan potensi yang ada di laut maupun darat (Masjhoer, 2019). Kawasan wisata pantai makin berkembang seiring dengan dukungan sarana dan prasarana pokok dan penunjang serta aktivitas manusia dan industri di sektor kelautan dan perikanan, transportasi, dan sektor lainnya yang saling mendukung serta kebutuhan manusia akan sarana rekreasi (Sahubawa *et al.*, 2015). Secara umum, pariwisata menyumbang kontribusi terbesar kelima di PDRB Provinsi DIY setelah sektor industri; pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan; informasi dan komunikasi; konstruksi (Happold, 2022). Wilayah pesisir DIY dikenal memiliki pemandangan yang indah dan menjadi destinasi wisata yang populer. Tercatat sebanyak 45 destinasi pariwisata bahari yang ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY, 2018; Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2021), dan termasuk ke dalam 10 destinasi wisata dengan jumlah pengunjung domestik dan mancanegara terbanyak di DIY (Happold, 2022).

Perkembangan kegiatan pariwisata bahari di DIY masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan yang timbul di wisata bahari DIY diantaranya adalah abrasi yang terjadi di Pantai Kuwaru, Kabupaten Bantul (Mutaqin, 2017); abrasi desa pesisir di Kab. Kulonprogo (Arman, 2017); pencemaran sampah di gisik Pantai Baron, Kabupaten Gunungkidul akibat aktivitas wisatawan (Kusumastuti & Pamungkas, 2018) dan kondisi terumbu karang mulai rusak di pantai Indrayanti, Krakal, Sundak Kabupaten Gunungkidul akibat aktivitas wisata massal (Nugraha & Santoso, 2018). Daerah lain di DIY yang dijadikan lokasi pariwisata bahari juga rentan terhadap bencana alam kepelepasiran seperti banjir rob, erosi pantai, angin topan, dan gelombang tsunami maupun dampak dari perubahan iklim (Nucifera *et al.*, 2019; Wahyuningsih *et al.*, 2016). Padahal pariwisata bahari ini merupakan salah satu sektor unggulan di wilayah pesisir. Pariwisata bahari yang dikelola dengan baik akan memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi regional di wilayah pesisir, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Zhang & Xing, 2023).

Penerapan BE dapat meningkatkan potensi pariwisata di kawasan pesisir dengan memperkuat daya tarik wisata dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Penerapan BE mencakup banyak kegiatan, termasuk pariwisata, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir (Kabil *et al.*, 2021; Wiratma & Nurgiyanti, 2019). Studi kasus penerapan BE ada di Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo. Dengan menerapkan prinsip-prinsip BE, Kabupaten Sampang dapat memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki secara berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Sampang, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung (Safi *et al.*, 2020). Dengan menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan perairan, Kota Probolinggo dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati di sekitar destinasi pariwisata (Marwiyah & Lailatul Fitria, 2023).

Pengelolaan wilayah pesisir, termasuk untuk kegiatan pariwisata seyogyanya dilakukan secara berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pariwisata turut berperan penting dalam penetapan rencana pembangunan berkelanjutan (Ilhami & Salahudin, 2021). Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan saat ini hingga masa mendatang (Wibowo & Belia, 2023). Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya (Kementerian Pariwisata, 2016). Pengelolaan wilayah pesisir DIY yang optimal akan meningkatkan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari masing-masing kabupaten (Purwantara *et al.*, 2014). Pengelolaan yang baik ini juga harus didukung dengan kesehatan lingkungan laut yang memadai guna memberikan manfaat secara berkesinambungan, baik untuk saat ini ataupun masa mendatang.

Pemerintah DIY memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 - 2027. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, konsep BE diartikan sebagai pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19 (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016; Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018). Penerapan konsep BE dapat membantu mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Lee *et al.*, 2020; Wenhai *et al.*, 2019). Konsep BE mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau, menekankan perencanaan menyeluruh dan pengembangan yang terkoordinasi antara ekosistem laut dan sistem ekonomi pesisir dan lautan (Garcia & Cortes, 2023).

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan, yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber data, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*). Di sisi lain, rencana Gubernur Provinsi DIY yang menjadikan Samudera Hindia sebagai tema dan kerangka berpikir dalam perumusan arah pembangunan DIY, membuat wilayah pesisir selatan menjadi kawasan prioritas untuk dikembangkan (Gubernur DIY, 2017; Rif'an & Irawati, 2020).

Pariwisata dan BE saling terkait dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir (Tegar & Saut Gurning, 2018). Pariwisata dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada ekonomi pesisir, dan merupakan sumber daya penting untuk pengembangan pesisir (Sotiriadis & Shen, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerapan BE dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir DIY. Pengumpulan data menggunakan *literaturereview* dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Pariwisata DIY. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator penerapan BE yang merupakan kombinasi dari indikator Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) (Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, 2020) dan *Ocean Health Index* (OHI) (Anh *et al.*, 2022; Halpern, 2020). Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) adalah indikator yang diestimasi untuk menunjukkan status kesehatan sumber

daya dan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu, biasanya satu tahun (Nikijuluw *et al.*, 2022). OHI merupakan panduan untuk menilai kesehatan laut yang digunakan secara global (Halpern *et al.*, 2017). Strategi pengembangan dianalisis menggunakan matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Analisis SWOT merupakan analisis yang memperhitungkan faktor internal meliputi *strength* dan *weakness* dan faktor eksternal meliputi *opportunity* dan *threat* dan kemudian sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi pengelolaan (Pickton, 2017).

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu lima bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2023 dengan lokasi penelitian berada di wilayah pesisir DIY yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Dari ketiga kabupaten tersebut terdapat 33 desa/kelurahan yang terletak pada 13 kecamatan yang berada di wilayah pesisir (Gambar 1).

Variabel dalam penelitian ini adalah potensi penerapan konsep BE dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan yaitu data terkait sektor perikanan meliputi nilai ekspor perikanan dan PDRB perikanan, data terkait sektor sumber daya kelautan meliputi jumlah produksi garam dan

rumput laut, data terkait kualitas perairan meliputi jumlah pelabuhan yang menerapkan konsep *green port*, data terkait pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, data terkait pariwisata bahari dan rencana pengembangan. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap pihak terkait sebanyak tiga orang yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka memperoleh gambaran kebijakan pemerintah DIY terhadap BE dan pariwisata berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY untuk memperoleh data serta kondisi aktual pemanfaatan wilayah pesisir di sektor perikanan serta Dinas Pariwisata sebagai pelaksana kebijakan di sektor pariwisata bahari, ekonomi kreatif dan sektor pendukung pariwisata lainnya. Untuk data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai referensi literatur yang terkait dengan BE, pariwisata berkelanjutan dan kondisi eksisting kawasan pesisir DIY. Jumlah literatur yang digunakan dan menjadi dasar *review* penelitian ini sebanyak 65 buah yang terdiri dari buku, jurnal maupun laporan instansi pemerintah terkait. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data terkait dengan pariwisata bahari baik nasional maupun di DIY, perlindungan pesisir, data bencana wilayah pesisir serta penggunaan dana keistimewaan DIY untuk mendukung pengembangan pariwisata bahari.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan matrik yang berisi indikator penerapan BE, kondisi eksisting wilayah pesisir DIY kebijakan terkait. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber data



Gambar 1. Peta Wilayah Pesisir di Provinsi DIY.
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.

seperti hasil wawancara, kajian dokumen dan informasi audio visual. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kunci utama penelitian dimana peneliti dapat mengumpulkan informasi serta menginterpretasi hasil penelitian. Validasi penelitian dilakukan dengan triangulasi data untuk mendukung justifikasi koheren hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini bersifat eksploratif untuk membangun pemahaman mengenai penerapan BE dalam bidang pariwisata di Provinsi DIY. Indikator penerapan BE yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari kombinasi indikator *Ocean Health Index* (OHI) (Anh *et al.*, 2022; Halpern, 2020) dan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) (Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, 2020). Menjaga kesehatan laut merupakan strategi utama dalam penerapan BE (Benzaken *et al.*, 2022). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk melihat potensi penerapan BE di wilayah pesisir DIY.

Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan dirumuskan menggunakan metode SWOT yang memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Matriks analisis SWOT disusun berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Strategi pengelolaan akan dirumuskan ke dalam matriks SWOT dengan kombinasi strategi sebagai berikut:

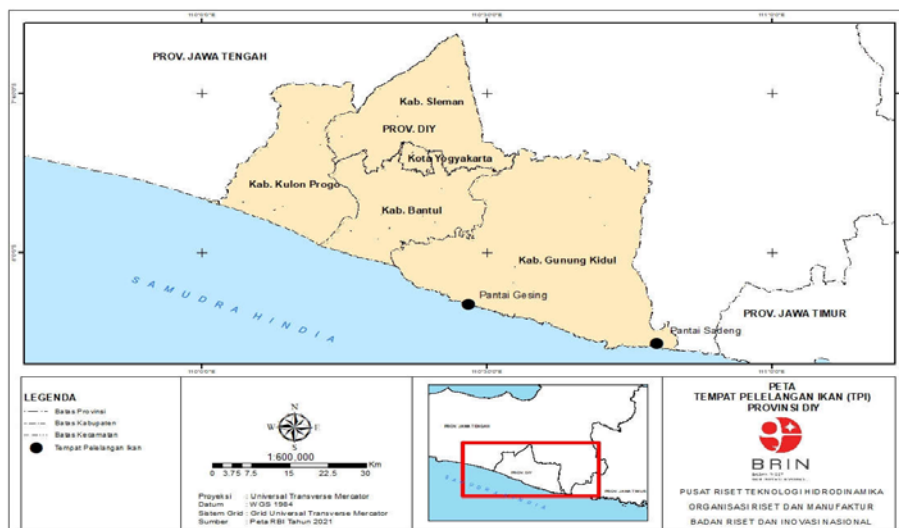
1. Strategi S - O: menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi S - T: menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman
3. Strategi W - O: meminimalkan kelemahan melalui pemanfaatan peluang

4. Strategi W - T: meminimalkan kelemahan dengan mengantisipasi ancaman atau kendala dari luar

POTENSI PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DI WILAYAH PESISIR YOGYAKARTA

Provinsi DIY terletak di tengah sisi selatan Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis Provinsi DIY terletak diantara 7°33'-8°15' Lintang Selatan dan 110°5' - 110°50' Bujur Timur. Provinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Secara garis besar, visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2022 - 2027 merupakan kelanjutan visi pada periode sebelumnya. Tiga prioritas utama dalam visi dan misi tersebut yaitu kawasan selatan, reformasi kelurahan dan teknologi informasi. Kawasan selatan dalam hal ini merupakan wilayah DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, menjadi perhatian khusus pemerintah.

Wilayah pesisir DIY memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Potensi-potensi yang ada diantaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian dan pariwisata. Kondisi eksisting perikanan tangkap yang berkembang di wilayah pesisir DIY belum optimal, nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun namun tingkat pemanfaatannya hanya berkisar 2% (Bappeda DIY, 2018). Baru sebagian kecil saja yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jenis komoditas ikan yang dominan diantaranya tuna, tongkol, cakalang dan layur. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terletak di Pantai Sadeng dan Pantai Gesing (Gambar 2).



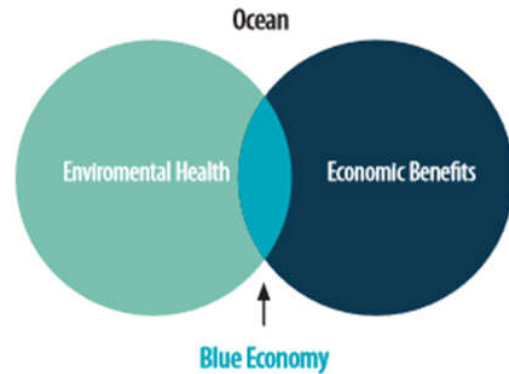
Gambar 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wilayah Pesisir DIY.
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.

Wilayah pesisir DIY juga memiliki kawasan hutan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Kawasan hutan mangrove berfungsi sebagai habitat biota laut sekaligus untuk mencegah abrasi garis pantai. Pertumbuhan hutan mangrove di Provinsi DIY mengalami sejumlah kendala akibat faktor alam, diantaranya adalah gelombang laut serta angin kencang sehingga banyak bibit mangrove yang tidak berhasil tumbuh (Jati & Pribadi, 2017). Luas hutan mangrove di Provinsi DIY pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan luas ini salah satunya disebabkan adanya *green belt* Yogyakarta International Airport (YIA) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo (DLHK DIY, 2021). Letak kawasan hutan mangrove dapat dilihat pada Gambar 3.

Kondisi perekonomian wilayah pesisir DIY sebagian besar masih tertinggal. Berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo (Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2022). Nilai PDRB tahun 2015 - 2019 ketiga kabupaten yang terletak di wilayah pesisir tersebut 46% lebih rendah jika dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Diperlukan pemanfaatan potensi yang optimal disana sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan wilayah pesisir DIY ke depan akan meningkat sehingga berpotensi menimbulkan tekanan pada lingkungan. Dorongan kebutuhan penerapan BE akan meningkat lebih cepat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Agar didapatkan pemahaman komprehensif mengenai penerapan BE maka dibutuhkan suatu *tools* yang berisi indikator kesehatan laut. Pada dasarnya, konsep BE adalah lensa untuk

melihat dan mengembangkan agenda kebijakan yang secara bersamaan meningkatkan kesehatan laut dan pertumbuhan ekonomi, dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi sosial seperti pada ilustrasi gambar berikut:



Gambar 4. Konsep Blue Economy.

Sumber: (Patil et al., 2016).

Ocean Health Index (OHI) merupakan suatu *framework* untuk menilai kesehatan laut berdasarkan penyediaan manfaat dan layanan berkelanjutan yang diharapkan masyarakat dari laut yang sehat, seperti makanan, nilai budaya dan sosial, serta pekerjaan (Halpern, 2020). *Framework* ini kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi pedoman Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada tahun 2020. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi; perlindungan pesisir; laut sebagai sumber mata pencaharian dan ekonomi; perairan yang bersih dan laut sebagai sumber produk alam. Pada Tabel 1 disajikan matriks penerapan BE di wilayah pesisir DIY serta kebijakan pendukungnya. Matriks tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur.



Gambar 3. Kawasan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir DIY.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.

Tabel 1. Matrik Penerapan Blue Economy di Pesisir DIY dan Kebijakan Pendukung.

No	Sektor	Variabel	Indikator	Kondisi Eksisting	Kebijakan Eksisting	Interpretasi Capaian
1	Laut sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	Destinasi wisata bahari	Jumlah destinasi	45 destinasi	1. RPJMD DIY 2017 - 2022 2. Renstra Dinas Pariwisata Yogyakarta 2022 - 2027	Pemerintah DIY telah mengupayakan pembangunan pariwisata bahari dan ekonomi kreatif berbasis pada <i>brand awareness</i> , kebudayaan lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan dari sektor budaya dan lingkungan namun upaya pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan sehingga tidak melebihi daya dukung kawasan
		Wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan (orang)	2021: 3.442.245 2020: 3.737.149 2019: 6.563.019	Perda 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi DIY 2012 - 2025	
		Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (orang)	2021: 520 2020: 2.369 2019: 13.969	Perda 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi DIY 2012 - 2025	
		Kontribusi PDB pariwisata	Juta PDRB Nasional	2021: 9.131.091 2020: 8.489.706 2019: 9.383.603	SE Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 kepada Bupati/Walikota se DIY, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Pemda DIY tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY	
		Nilai devisa pariwisata	USD Milyar/Tahun	secara Nasional 2018: 229,50 2019: 280	Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Badan Parekraf No 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2020 - 2024	
2	Perlindungan Pesisir	Penyerapan Tenaga kerja Sektor Pariwisata	Orang	tahun 2019: 9.123 tahun 2020: 7.433 tahun 2021: 6.392	Perda DIY No 4 Tahun 2020 tentang Kepramuwisataan	
		Lebar sempadan pantai	meter	100 meter dari garis pantai	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	Perlindungan pesisir DIY masih belum terintegrasi secara optimal dalam lingkup pemerintahan, baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Perlindungan pesisir masih bersifat parsial dan belum merata.
		Luas Kawasan Konservasi Perairan/Taman Nasional Laut dan Cagar Alam Laut (KKPD, KKPN, Taman Nasional)	Ha	di Kabupaten Bantul seluas 695,89 Ha	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Luas kawasan hutan mangrove sudah menunjukkan peningkatan di area Baros Pengklik dan <i>Green Belt</i> YIA. Sedangkan konservasi terumbu karang belum banyak dilakukan.

Lanjutan Tabel 1.

No	Sektor	Variabel	Indikator	Kondisi Eksisting	Kebijakan Eksisting	Interpretasi Capaian
3	Laut sebagai Sumber Mata Pencarian dan Ekonomi	Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	Ha	3,05 Ha 10% baik, 20% sedang dan 70% rusak	1. PermenLHK No 4 Tahun 2001 2. Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	
		Rehabilitasi Mangrove	Ha	Luas tutupan hutan Mangrove 2020: 5 Ha 2021: 198,81 Ha	Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014	
		Rehabilitasi Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai	Lokasi	Pantai di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	
		Nilai Ekspor Perikanan	Kilogram	2019: 19.430,19 2020: 32.554,01 2021: 12.106,27 2022: 23.144,12	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	Belum tersedia masterplan dalam pemanfaatan laut sebagai sumber mata pencarian dan ekonomi. Saat ini, instrument kebijakan yang ada masih bersifat parsial. Kondisi perairan dan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kawasan pesisir.
		PDRB Perikanan	Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	PDRB subsektor perikanan DIY tahun 2018-2021 rata-rata 0,63% terhadap PDB nasional yaitu sebesar 345.870 (juta rupiah) pada tahun 2022	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	
		Persentase Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	Kontribusi terhadap PDRB DIY (%)	10% baik, 20% sedang dan 70% rusak	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	
		PDRB Maritim	Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	0,25 (dihitung dari sektor perikanan dan wisata bahari saja)	1. Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030	
					2. Renstra Dinas Pariwisata Yogyakarta 2017 - 2022	

Lanjutan Tabel 1.

No	Sektor	Variabel	Indikator	Kondisi Eksisting	Kebijakan Eksisting	Interpretasi Capaian
4	Perairan yang bersih	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	<p>Sampel pantai: Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah dan Pantai Kuwaru</p> <p>1. Kualitas BOD: seluruh pantai berada dalam kisaran normal namun Pantai Kuwaru sudah berada dalam ambang batas tinggi</p> <p>2. Kualitas TSS: Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah dan Pantai Kuwaru mempunyai nilai TSS melebihi ambang batas normal</p> <p>3. Kualitas coliform: seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>4. Kualitas DHL: tidak ada data</p> <p>5. Kualitas salinitas: seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>6. Kandungan kadmium (Cd) : seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>7. Kandungan Kromium (Cr) : seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>8. Kandungan timbal (Pb): seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>9. Kandungan nikel (Ni): seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p> <p>10. Kandungan seng (Zn): seluruh pantai berada dalam kisaran normal</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut</p>	<p>Kondisi perairan laut di DIY tergolong bersih karena minimnya aktivitas industri di sekitar kawasan pesisir. Upaya pengelolaan sampah dampak dari kegiatan pariwisata masih perlu ditingkatkan.</p>
5	Laut sebagai Sumber Produk Alam	<p>Jumlah <i>Green Port</i> dan Pengelolaan Sampah Plastik</p> <p>Produksi garam sebagai bahan baku</p> <p>Produksi Rumput Laut</p>	<p>Program <i>Green Port</i> dari Kemenko Marves</p> <p>Kg/Tahun</p> <p>Kg/Tahun</p>	<p>Pelabuhan yang sudah memiliki sertifikat ISO 14001: 0 Pelabuhan</p> <p>2020: 7.238 2021: 13.750</p> <p>2019: 474.799 2020: 140.667 2021: 2 73.366</p>	<p>PerDirjen PPKL KLHK Nomor: P.11/PPKL/SET/WAS.1/8/2018 tentang Kriteria Evaluasi Kinerja Pelabuhan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Perda DIY No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pembudidaya Garam</p> <p>Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 – 2030</p>	<p>Pemanfaatan laut sebagai sumber produk alam sudah dilaksanakan namun belum optimal</p>

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Provinsi DIY memiliki sejumlah potensi keindahan pantai selatan Jawa yang membentang di antara Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Salah satu objek pariwisata bahari, yaitu Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul menjadi objek wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik pada tahun 2020 sebanyak 2.789.354 kunjungan. Sedangkan Pantai Timang di Kabupaten Gunung Kidul juga menjadi destinasi pariwisata bahari favorit untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sebanyak 9.250 kunjungan (Buro Happold, 2022). Destinasi pariwisata bahari lainnya di Provinsi DIY yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan cukup tinggi berada di Kawasan Pantai Baron – Seruni, Pantai Glagah, Pantai Depok, Kawasan Pantai Gesing, Pantai Buron dan Kesirat. Destinasi pariwisata bahari yang belum banyak dikunjungi diantaranya adalah Pantai Congot, Pantai Goa Cemara, Pantai Ngeden dan Pantai Siung (Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2021). Upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata bahari terus dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan menetapkan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata bahari yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY. Penambahan akses serta fasilitas pariwisata juga terus diupayakan agar kenyamanan wisatawan dapat terjamin.

Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan asing) dan kontribusi pariwisata kepada PDRB DIY mengalami penurunan hampir sebanyak 50% mulai tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan aktivitas wisata mengalami penurunan sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja wisata pada tahun 2020 juga menurun 20% dibanding tahun 2019. Dampak pandemi ini masih berlanjut hingga tahun 2021, namun sejak PPKM dilonggarkan pada pertengahan tahun 2021, kondisi mulai membaik dan aktivitas wisata mulai mengalami peningkatan kembali (Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Pada tahun 2021, kontribusi PDB pariwisata meningkat 8% dibanding tahun 2020. Pelonggaran PPKM juga didukung dengan implementasi kebijakan Pemda DIY yang mengeluarkan SE Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY sehingga industri wisata di DIY bisa pulih kembali.

Kondisi lingkungan wilayah pesisir tentunya harus dilindungi agar pemanfaatannya bisa terjaga dan berlanjut. Pemda DIY menunjukkan komitmen

perlindungan wilayah pesisir dengan menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 – 2030 yang tertuang dalam Perda DIY No. 16 Tahun 2011. Kondisi perairan laut di DIY masih cukup ideal yang dibuktikan dengan baku mutu air lautnya rerata masih dalam kisaran normal. Perairan yang bagus ini mendukung pertumbuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya sehingga potensi perikanan tangkap juga bisa meningkat. Terdapat peningkatan nilai ekspor perikanan tangkap sebanyak 90% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY tahun 2022, potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir DIY sebanyak 32.000 ton namun yang baru bisa ditangkap hanya 12,5% saja. Kondisi ini terjadi karena belum ada pelabuhan besar di DIY.

Komitmen Pemda DIY untuk melindungi pesisir juga terlihat dengan program dari Dinas Lingkungan Hidup yang menambah jumlah areal tutupan hutan mangrove yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kab. Kulon Progo. Luas hutan mangrove tahun 2021 meningkat 4000% dibanding tahun 2020. Luas hutan mangrove tahun 2020 adalah 5 Ha sedangkan pada tahun 2021 menjadi 198,5 Ha. Penambahan lokasi hutan mangrove terdapat di sekitar kawasan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kecamatan Temon dan Kecamatan Sanden. Penambahan areal tutupan hutan mangrove meningkat signifikan di area sekitar Bandara YIA dalam rangka mitigasi tsunami di pantai selatan. Selain untuk mitigasi bencana tsunami, mangrove di DIY juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, mencegah abrasi pantai dan mengurangi pencemaran (Hilmi *et al.*, 2022; R. B. A. Nugraha *et al.*, 2019). Status rehabilitasi terumbu karang menunjukkan hasil yang berbeda dengan hutan mangrove. Kondisi terumbu karang belum ada perbaikan sejak tahun 2020 hingga saat ini dimana kerusakannya mencapai 70% luas tutupan. Belum adanya kebijakan Pemda DIY yang mengakomodasi perlindungan terumbu karang secara khusus menyebabkan upaya rehabilitasi belum berjalan.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis interpretasi capaian yang telah divalidasi oleh stake holder terkait, kondisi eksisting penerapan BE di pesisir DIY dan kebijakan pendukung sudah terlaksana namun belum optimal dan selaras. Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan tentang pengaturan BE secara terpadu di level Pemerintah Provinsi. Sektor ekonomi dan pariwisata memegang peranan penting bagi wilayah pesisir DIY. Wilayah pesisir DIY memiliki *landscape* yang menawan dan ciri unik seperti gumuk pasir aeolian, pantai karst, pantai pasir putih serta pantai pasir hitam.

Pantai-pantai ini menjadi destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik dan asing. Jumlah wisatawan yang berkunjung diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meredanya pandemi Covid 19. Kebijakan dan peraturan yang disusun oleh Pemerintah DIY cukup lengkap dan hampir mencakup semua aspek seperti kepramuwisata, rencana pengembangan pariwisata, pemulihan kondisi pariwisata pasca pandemi serta pengaturan tata ruang wilayah pesisir untuk mengakomodir kegiatan wisata.

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PESIRIS YOGYAKARTA

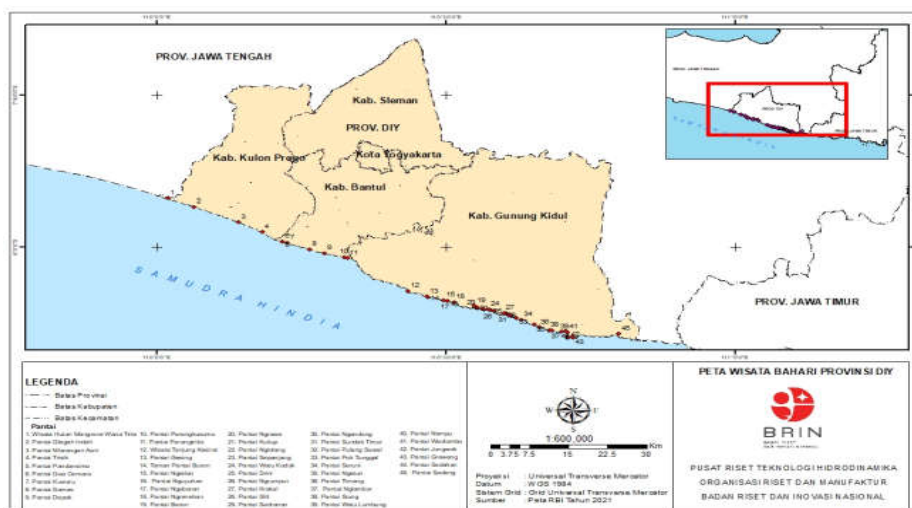
Kontribusi sektor ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi. Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi rata-rata per kecamatan di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,74%. Total kontribusi Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap provinsi adalah 24,33% dari PDRB DIY (Bappeda DIY, 2018). Pariwisata di wilayah pesisir, atau dapat disebut dengan istilah pariwisata bahari merupakan tulang punggung aktivitas perekonomian di masyarakat. Sebanyak 45 destinasi pariwisata bahari ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY, 2018) (Gambar 5).

Pariwisata bahari di wilayah pesisir DIY termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata di DIY dengan jumlah pengunjung domestik dan mancanegara terbanyak. Pariwisata menjadi 10 besar sektor yang menopang perekonomian DIY. Sektor kegiatan akomodasi dan jasa makanan yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata menjadi

salah satu sektor ekonomi yang tumbuh signifikan di Provinsi DIY. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 8,84% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Provinsi DIY (Happold, 2022). Pendapatan dari sektor wisata bahari menumpang 5% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 Provinsi DIY.

Pengelolaan wilayah pesisir DIY hingga saat ini masih terus membutuhkan upaya perbaikan. Pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Bantul masih berstatus kurang berlanjut dari segi aspek lingkungan, sosial dan transversal (Hasanah, 2022). Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah. Hambatan yang ditemui yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan dan kurangnya kesempatan kerja karena bergantung pada musim (Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020). Masyarakat pesisir seharusnya memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteranya dengan cara memanfaatkan potensi pariwisata bahari. Usaha pengelolaan wilayah pesisir harus dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk wisatawan, sehingga akan meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Sudarsono & Susantun, 2019).

Sejumlah upaya pemerintah untuk mendongkrak sektor pariwisata bahari telah dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas menuju wilayah pesisir dan penyediaan infrastruktur strategis. Proyek Jaringan Jalan Lingkar Selatan (JJLS) di selatan DIY dan Bandara YIA merupakan upaya penyediaan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan mewujudkan



Gambar 5. Destinasi Wisata Bahari Wilayah Pesisir DIY.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

wilayah selatan DIY sebagai halaman depan DIY (Bappeda DIY, 2018; Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2012). Arah pengembangan rencana tata bangunan dan lingkungan pada wilayah pesisir tertuang dan menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012 – 2025. Arah pengembangan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Pantai Congot – Glagah – Bugel dan sekitarnya; Pantai Parangtritis – Depok – Kuwaru dan sekitarnya; Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya serta Pantai Siung – Wediombo dan sekitarnya.

Pariwisata merupakan sektor yang bersifat *multiplier effect*, dimana suatu kondisi pengembangan pariwisata dapat berpengaruh terhadap sektor – sektor lain yang mendukung sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata bahari diyakini mempunyai *multiplier effect* yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendatangkan wisatawan asing (Nuryadin & Purwiyanta, 2023). Peningkatan daya saing pariwisata bahari dilakukan demi kemajuan perekonomian DIY, namun hendaknya dalam pelaksanaannya harus selaras dengan daya dukung (*carrying capacity*). Saat ini daya dukung kawasan wisata Pantai Selatan sudah berlebih sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik (Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Supaya pengelolaan wisata bahari sejalan dengan prinsip kelestarian yang tercakup dalam konsep BE, perlu dirumuskan strategi pengoptimalannya dengan menggunakan analisis SWOT (Tabel 2).

Dalam melaksanakan pengoptimalan implementasi BE sektor pariwisata bahari dapat dilakukan dengan menggunakan strategi SO, WO, ST dan WT. Dalam rangka mencapai strategi-strategi tersebut, ada 13 langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan eksplorasi dan promosi destinasi wisata baru: Melakukan penelitian dan survei untuk mengidentifikasi potensi destinasi wisata bahari baru di DIY. Mengembangkan program promosi yang efektif untuk menarik minat wisatawan.
2. Pengembangan wisata berbasis budaya dan tradisi: Mempromosikan kekayaan budaya dan tradisi DIY sebagai daya tarik utama pariwisata. Mengembangkan program wisata budaya yang melibatkan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan budaya tersebut.
3. Peningkatan dukungan infrastruktur: Melakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan

infrastruktur yang mendukung pariwisata bahari, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Memastikan infrastruktur yang ada merata di berbagai destinasi wisata.

4. Peningkatan promosi wisata dengan teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile, untuk memperluas jangkauan promosi wisata DIY. Menggunakan konten visual menarik untuk menarik minat wisatawan.
5. Pengembangan destinasi pariwisata dengan *landscape* menarik: Melakukan perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan memperhatikan keindahan alam dan *landscape* yang menarik. Memanfaatkan dana keistimewaan DIY untuk memperbaiki dan mempercantik destinasi wisata.
6. Pemerataan amenities pariwisata bahari: Memastikan bahwa amenities pariwisata bahari tersedia secara merata di berbagai destinasi wisata. Mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan amenities dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Pemanfaatan dana keistimewaan DIY: Mengalokasikan dana keistimewaan DIY untuk perbaikan manajemen pengelolaan pariwisata. Memastikan penggunaan dana tersebut efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata bahari.
8. Peningkatan koordinasi antar stakeholder pariwisata: Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, industri pariwisata, dan pihak terkait lainnya. Melakukan pertemuan rutin dan berbagi informasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan pariwisata bahari.
9. Peningkatan kemampuan SDM pariwisata: Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pariwisata. Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk memberikan pelatihan secara online atau jarak jauh.
10. Pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu: Menerapkan pendekatan pengelolaan destinasi pariwisata yang terpadu, termasuk pengaturan *carrying capacity* untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas pariwisata. Melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
11. Pembangunan amenities pariwisata di daerah dengan resiko bahaya rendah: Memilih lokasi pembangunan amenities pariwisata yang memiliki

resiko bahaya rendah, seperti daerah yang tidak terkena bencana alam secara signifikan. Melakukan penilaian risiko sebelum memulai pembangunan.

12. Penyediaan sarana pembuangan sampah: Membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan di destinasi pariwisata. Memastikan adanya tempat pembuangan sampah yang memadai dan melakukan edukasi kepada wisatawan dan

masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

13. Pembatasan kendaraan pada daerah pariwisata dengan akses jalan yang belum memadai: Mengatur kebijakan pembatasan kendaraan pada daerah pariwisata yang memiliki akses jalan yang belum memadai. Mendorong penggunaan transportasi umum atau transportasi lainnya untuk mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan.

Tabel 2. Strategi Pengoptimalan Implementasi BE Sektor Pariwisata Bahari.

Analisis Lingkungan Eksternal	Analisis Lingkungan Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
		1. Garis pantai provinsi DIY sepanjang 113 km dan masih banyak pantai baru untuk dieksplor menjadi destinasi wisata bahari 2. Atraksi wisata dan budaya di wilayah pesisir 3. Jenis pilihan destinasi wisata beranekaragam 4. Harga tiket masuk terjangkau 5. Memiliki <i>landscape</i> yang menawan	1. Amenitas pariwisata bahari belum merata 2. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu 3. Perlu peningkatan kualitas SDM pariwisata 4. Kurangnya sinergi antar stakeholder pariwisata 5. Manajemen pengelolaan masih belum optimal
	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S - O	Strategi W - O
	1. Promosi pariwisata dilakukan secara masif 2. Pantai selatan DIY merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan pariwisata antar regional Yogyakarta-Solo-Semarang (joglosemar) 3. Dukungan infrastruktur berupa Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan proyek tol DIY – Jawa Tengah 4. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelayanan pariwisata melalui aplikasi “Visiting Jogja”. 5. Pemanfaatan dana keistimewaan dalam mendukung pariwisata bahari	1. Pengoptimalan eksplorasi dan promosi destinasi wisata bahari baru yang terletak di sepanjang garis pantai DIY 2. Pengembangan wisata berbasis budaya dan tradisi yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan agenda wisata serupa di KSPN Borobudur maupun joglosemar 3. Peningkatan dukungan infrastruktur secara merata pada berbagai destinasi wisata 4. Peningkatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi 5. Pengembangan destinasi pariwisata dengan <i>landscape</i> menarik dengan menggunakan dana keistimewaan DIY	1. Pemerataan amenitas pariwisata bahari dengan memanfaatkan dukungan infrastruktur di DIY 2. Pemanfaatan dana keistimewaan DIY untuk perbaikan manajemen pengelolaan 3. Peningkatan koordinasi antar stakeholder pariwisata internal DIY maupun eksternal seperti KSPN Borobudur dan joglosemar 4. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM pariwisata dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang
	Ancaman (<i>Threat</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
	1. Daerah rawan bencana alam (gempa, tsunami, <i>rip current</i> dan gelombang tinggi) 2. Persaingan pariwisata dengan daerah lain 3. <i>Over carrying capacity</i> (daya tampung) 4. Akses jalan terbatas 5. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata	1. Pemilihan destinasi wisata baru yang memiliki resiko bencana rendah 2. Peningkatan eksplorasi wisata berbasis budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah lain 3. Pengoptimalan <i>carrying capacity</i> pada masing-masing destinasi pariwisata bahari, jika sudah melebihi kapasitas dapat dialihkan ke destinasi lain 4. Pengelolaan destinasi pariwisata bahari secara terpadu untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peningkatan kualitas pariwisata bahari	1. Pembangunan amenitas pariwisata dilaksanakan di daerah yang resiko bahayanya rendah dan daya tampungnya masih memadai 2. Penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah untuk menghindari kerusakan lingkungan 3. Peningkatan koordinasi antar stakeholder terkait dengan manajemen pengelolaan pariwisata 4. Pembatasan kendaraan pada daerah pariwisata yang memiliki akses jalan yang belum memadai

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

PENUTUP

Potensi penerapan ekonomi biru dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di DIY sangat besar. DIY memiliki garis pantai sepanjang 113 km dengan banyak pantai baru yang dapat dieksplorasi sebagai destinasi wisata bahari. Wilayah pesisir DIY juga kaya akan atraksi wisata dan budaya, dengan beragam pilihan destinasi wisata yang menarik. Harga tiket masuk yang terjangkau, *landscape* yang menawan, dan promosi pariwisata yang masif juga menjadi daya tarik tersendiri. Pantai selatan DIY merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Joglosemar, yang memberikan potensi besar untuk mendatangkan wisatawan. Dukungan dari Pemerintah Daerah setempat berupa kebijakan yang mendukung serta pembangunan infrastruktur seperti Bandara YIA, JJLS, dan proyek tol DIY - Jawa Tengah juga menjadi faktor penting.

Untuk mewujudkan implementasi *Blue Economy* (BE) dalam sektor pariwisata bahari di DIY, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan destinasi wisata bahari berkelanjutan, diversifikasi produk wisata bahari, peningkatan infrastruktur pendukung, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan edukasi, kolaborasi dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM pariwisata, dan pengembangan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu, DIY dapat mewujudkan pariwisata bahari yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber baik dari Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Maria Nooza Airawati, Ibnu Fauzi dan Alan Putranto sebagai kontributor utama. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, G. (2017). Hubungan Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi Wilayah di Gunungkidul Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.16-27>.
- Anh, K., Nguyen, T., & Jolly, C. M. (2022). *The Use of a Production Function to Evaluate Caribbean Ocean Health Conflicts and Economic Development: Policy Implications*. 808–826. <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01696-7>.
- Arman, F. (2017). *Kajian Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Karakteristik Angin, Gelombang Laut dan Arus* [Cambridge University Press]. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/type/book_part.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020* (Vol. 1, Issue 2, pp. 1–166).
- Badan Pusat Statistik Yogyakarta. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan, 2020 - 2022)*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Bappeda DIY. (2018). Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022. In *Biro Hukum Sekda DIY* (Vol. 1, Issue 69, pp. 5–24).
- Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. *Frontiers in Political Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318>.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2021/2022* <https://yogyakarta.bps.go.id/ation/2020/11/26/88741bf53c08bb6603931a24/indikator-pembangunan-berkelanjutan-daerah-istimewa-yogyakarta-2019-2020.html>.
- Buro Hapold. (2022). *Market Analysis and Demand Assessment for The Extension of Integrated Tourism Destination: Central Java and DIY Assessment Report*. https://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20221012.1987.1. Central Java Assessment Report v6-ID.pdf.
- Chandra, Y. A. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56. http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY. (2022). *Buku Monografi 2021*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. 0274, 1–79. www.visitingjogja.jogjapro.go.id.
- Dinas Pariwisata Provinsi DIY. (2012). *Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025*.
- Dinas Pariwisata Provinsi DIY. (2021). Buku Statistik Kepariwisata 2021. In *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- DLHK DIY. (2021). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*. <https://dlhk-temp.jogjapro.go.id/wp-content/uploads/2023/10/LAP-IKLH-2020-edit-13-April-2021.pdf>.
- Gai, A. M., Soewarni, I., & Sir, M. M. (2018). The concept of community poverty reduction in coastal area of Surabaya based on sustainable livelihood approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 137(1), 012099. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012099>.
- Garcia, M. da G., & Cortes, A. (2023). *Blue Planet Law*.
- Gubernur DIY. (2017). *Visi Dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022*. 1–24.
- Halpern, B. S. (2020). Building on a Decade of the Ocean Health Index. *One Earth*, 2(1), 30–33. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.011>.
- Halpern, B. S., Frazier, M., Afflerbach, J., O'Hara, C., Katona, S., Stewart Lowndes, J. S., Jiang, N., Pacheco, E., Scarborough, C., & Polsenberg, J. (2017). Drivers and implications of change in global ocean health over the past five years. *PLOS ONE*, 12(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178267>.
- Hasanah, N. (2022). Keberlanjutan pariwisata di pesisir selatan Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah*, XXII(1), 4128–4145.
- Hilmi, E., Amron, & Christianto, D. (2022). The potential of high tidal flooding disaster in North Jakarta using mapping and mangrove relationship approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 989(1), 0–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/989/1/012001>
- Ikejiaku, B.-V. (2009). The Concept 'Poverty' towards Understanding in the Context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty': with Some Comparative Evidence on Britain. *Journal of Sustainable Development*, 2(2), 3–13. <https://doi.org/10.5539/jsd.v2n2p3>.
- Ilhami, M. R., & Salahudin, S. (2021). Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan community based tourism: a systematic literature review. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 100–120. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5755>.
- Indraswari, D. L. (2023). *Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan*.
- Jati, I. W., & Pribadi, R. (2017). Penanaman Mangrove Tersistem sebagai Solusi Penambahan Luas Tutupan Lahan Hutan Mangrove Baros di Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 148–153.
- Kabil, M., Priatmoko, S., Magda, R., & Dávid, L. D. (2021). Blue economy and coastal tourism: A comprehensive visualization bibliometric analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/su13073650>.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2021). *Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir*. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/38902/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-pesisir/0/berita>.
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. (2020). *Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)*.
- Kementerian Pariwisata. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. In *Peraturan Menteri Pariwisata*. www.jdih.kemendparekraf.go.id
- Kusumastuti, A. H., & Pamungkas, A. (2018). Potensi dan Permasalahan Daya Dukung Lingkungan berdasarkan Aspek Daya Dukung Fisik, Daya Dukung Ekologis, dan Daya Dukung Sosial pada Pantai Baron. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1). <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/25011>.
- Lázár, A. N., Adams, H., Adger, W. N., & Nicholls, R. J. (2020). Modelling household well-being and poverty trajectories: An application to coastal Bangladesh. *PLOS ONE*, 15(9), e0238621. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238621>.
- Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137(January), 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan

- hak asasi manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106–126.
- Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., Pires Manso, J. R., & De Pablo Valenciano, J. (2023). Impact of blue economy sectors using causality, correlation and panel data models. *Frontiers in Marine Science*, 10(January), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1034054>.
- Marwiyah, S., & Lailatul Fitria, N. J. (2023). Implementation of the Blue Economy Policy in Probolinggo City for the Development of the Creative Economy of Processed Fisheries and Marines. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 51–68. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1148>
- Masjhoer, J. M. (2019). *Pengantar Wisata Bahari* (Issue April 2020). https://www.researchgate.net/publication/340883202_Pengantar_wisata_bahari.
- Mutaqin, B. W. (2017). Shoreline changes analysis in kuwaru coastal area, yogyakarta, Indonesia: An application of the digital shoreline analysis system (DSAS). *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 12(7), 1203–1214. <https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N7-1203-1214>.
- Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget*, 7(2), 340–364.
- Nikijuluw, V. P., Manafi, M. R., Bengen, D. G., & Supriatna, A. (2022). *Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI): Hasil Estimasi Skor IKLI Tahun 2022*. Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia.
- Nucifera, F., Riasasi, W., Putro, S. T., & Marfai, M. A. (2019). Penilaian Kerentanan dan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami di Pesisir Sadeng, Gunungkidul. *Jurnal Geografi*, 11(2), 182–192. <https://doi.org/10.24114/jg.v11i2.11475>.
- Nugraha, F. S., & Santoso, A. (2018). Kajian Kesesuaian Dan Daya Dukung Kawasan Pesisir Pantai Nglambor Kab. Gunungkidul Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata Bahari. *Journal of Marine Research*, 7(3), 159–168.
- Nugraha, R. B. A., Syaharani, L., Iska, R., Mulyana, D., Wahyudin, Y., Purbani, D., Jayawiguna, H., Triyono, T., Setiawan, A., & Fajar, P. (2019). The impact of land used changes on mangrove forest and shoreline dynamic in Muara Gembong, Bekasi, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 241(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/241/1/012018>.
- Nuryadin, D., & Purwiyanta. (2023). *Multiplier Effects of Tourism Sector in Yogyakarta: Input-Output Analysis*. 16(1), 170–183.
- Pasda, S., Bado, B., & Hasbiah, S. (2019). Model of Poverty Reduction by Strengthening Institutional Cooperatives for Coastal Areas of South Sulawesi. *Proceedings of the First International Conference on Materials Engineering and Management - Management Section (ICMEMM 2018)*, 75(ICMEMM 2018), 255–259. <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.34>.
- Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean. *An Overview. The World Bank*, 92. <http://documents.worldbank.org/curated/en/965641473449861013/pdf/AUS16344-REVISED-v1-BlueEconomy-FullReport-Oct3.pdf>.
- Pemerintah Provinsi DIY. (2016). *Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026* (pp. 1–23).
- Pemerintah Provinsi DIY. (2018). *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 - 2038*.
- Pickton, D. (2017). *What's swot in strategic analysis?* 1697(March 1998). [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1697\(199803/04\)7](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1697(199803/04)7).
- Purwantara, S., Sugiharyanto, S., & Khotimah, N. (2014). Karakteristik Spasial Pengembangan Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks UUK DIY. *Artikel Penelitian Hibah Bersaing*, 1–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/33521436.pdf>.
- Rif'an, A. A., & Irawati, N. (2020). Penataan Ruang Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Mitigasi Terhadap Bencana Banjir Rob. *Jurnal Penataan Ruang*, 15(2), 42. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v15i2.7268>.
- Rukin, R. (2018). Economic development as a way to fight against poverty in a coastal society. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(2), 230. <https://doi.org/10.20473/mkp.V31I22018.230-240>.
- Safi, S., Yulianti, R., & Mukarromah, S. W. (2020). Internalisasi Prinsip Blue Economy Dalam Pengaturan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Rechts*, 12(July), 1–23.
- Sahubawa, L., Khakim, N., & Lasindrang, M. (2015). Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Upaya Percepatan Investasi. *Jurnal Teknosains*, 4(2), 101–120. <https://doi.org/10.22146/teknosains.7953>.
- Setijawan, A. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoearth*, 3(1), 7–11.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.
- Sotiriadis, M., & Shen, S. (2020). *Blue Economy and Sustainable Tourism Management in Coastal Zones: Learning from experiences* (Issue 1174).
- Sudarsono, H., & Susantun, I. (2019). Pengembangan Potensi Wisata di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Agriekonomika, 8(1), 81. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5011>.

- Tegar, D., & Saut Gurning, R. O. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 2(2). <https://doi.org/10.12962/j25481479.v2i2.3650>.
- Wahyuningsih, D. S., Putra, M. D., Wulan, T. R., Putra, A. S., Maulana, E., & Ibrahim, F. (2016). Mitigasi Bencana Erosi Kepesisiran Di Pantai Kuwaru Dan Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional Geografi UMS*, 8(4 June).
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Sepp Neves, A. A., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6(JUN), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>.
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 14–22.
- Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2019). Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy. *Nation State Journal of International Studies*, 2(2), 161–172. <https://doi.org/10.24076/nsjis.2019v2i2.164>.
- Zhang, G., & Xing, L. (2023). Research on tourism economic effect under the threshold of new-type urbanization in coastal cities of China: From the perspective of development economics. *Ocean & Coastal Management*, 239(238), 106587. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106587>.